

# Sosialisasi dan Penyaluran KUR

Oleh Hestiana

Rabu, 28 Juli 2010

Pemerintah memastikan realisasi pengucuran dana skim kredit usaha rakyat (KUR) 2010 tidak akan mencapai target Rp 20 triliun. Realisasi penyaluran dana KUR oleh bank-bank pelaksana selama triwulan pertama 2010 tercatat kurang dari Rp 2 triliun. Pemerintah pun akhirnya menurunkan target realisasi dana KUR tahun ini menjadi sekitar Rp 13,1 triliun. Namun, target itu kemudian diubah lagi setelah pada semester pertama tahun ini realisasi dana KUR mencapai Rp 5,1 triliun.

KUR adalah salah satu program pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan bantuan kredit permodalan. Program ini diluncurkan karena masih banyak UMKM di negeri ini yang sulit mendapatkan akses permodalan dari perbankan.

Sejak diluncurkan akhir 2007, realisasi dana yang dikucurkan oleh bank pelaksana lewat skim KUR terus mengalami peningkatan. Tahun ini pemerintah pada awalnya menargetkan realisasi dana sebesar Rp 20 triliun, walaupun diralat menjadi Rp 13,1 triliun dan diralat lagi menjadi Rp 18 triliun.

Besarnya target yang ditetapkan pemerintah terhadap realisasi dana KUR patut didukung. Dengan besarnya realisasi dana KUR, berarti makin banyak pengusaha UMKM di dalam negeri yang menikmati fasilitas pendanaan tersebut, dan diharapkan akan terjadi perbaikan ekonomi.

Namun, melihat realisasi pada semester I tahun ini, diperlukan usaha lebih keras lagi dari pemerintah agar target yang dicanangkan bisa tercapai. Saat ini masih banyak kendala yang ditemukan di lapangan. Misalnya, soal masih besarnya suku bunga yang diterapkan bank pelaksana, penyertaan agunan, serta belum adanya kemauan dari pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan realisasi dana KUR.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan penyaluran KUR masih sangat jauh dari target. Sampai Maret 2010, penyaluran KUR sekitar Rp 2 triliun atau baru 10 persen dari target pemerintah tahun 2010 ini sebesar Rp 20 triliun. Apabila proporsi penyaluran dibagi dalam kuartalan, seharusnya minimal sudah tersalur pada kuartal 1 ini sebesar Rp 5 triliun.

Karena itu, Kementerian BUMN mendorong bank-bank pelat merah untuk memenuhi komitmen mereka selaku badan yang ditunjuk menjadi penyalur KUR. Rendahnya realisasi penyaluran KUR pada kuartal I 2010 menyiratkan perlunya menggerakkan bank secara serius untuk aktif menyalurkan KUR. Tanpa adanya dorongan serius, realisasi penyaluran KUR dikhawatirkan kembali meleset dari target seperti pada 2009.

Kementerian BUMN telah mengundang BNI, Bank Mandiri, BRI, BTN, Bank Syariah Mandiri, serta bank swasta Bukopin untuk mengevaluasi target penyaluran KUR masing-masing beserta kesiapan mereka dalam penyalurannya. Pada kesempatan itu, keenam bank tersebut telah menyatakan kesanggupannya menyalurkan KUR hingga Rp 15,55 triliun atau 77,5% dari plafon KUR 2010 (Rp 20 triliun). Perinciannya, BRI sebesar Rp 8 triliun, Mandiri Rp 3 triliun, BNI Rp 3 triliun, BTN Rp 500 miliar, Bank Syariah Mandiri Rp 300 miliar, dan Bukopin Rp 750 miliar. Adapun sisanya, Rp 4,45 triliun, dilaksanakan 16 BPD yang diorganisasikan di bawah Kemenko Perekonomian.

Sosialisasi KUR sendiri sampai sekarang masih kurang. Banyak warga masyarakat belum tahu apa itu KUR. Itu merupakan kesalahan pemerintah, dari tingkat menteri hingga kepala dinas di wilayah-wilayah. Meski bukan pemerintah yang menyalurkan, tetapi pemerintah harus menyadari peran dan fungsinya sebagai fasilitator untuk menyosialisasikan KUR.

Pemerintah juga harus melakukan pemangkasan proses birokrasi yang berbelit agar penyaluran KUR tidak terhambat. Suku bunga pun perlu diturunkan agar pelaku UKM bergairah. Para kepala dinas di daerah harus rajin berinteraksi dengan masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan setidaknya ada 50 juta UMKM yang bisa memperoleh KUR. Tapi, dari Rp 3 triliun yang disalurkan, sampai dengan Mei 2010 baru Rp 2,7 juta yang memanfaatkan. Dari jumlah itu, sektor paling besar masih perdagangan (68%), pertanian (17%-18%), sedangkan industri pengolahan baru di kisaran 3%-4%. Besarnya kredit sektor perdagangan tidak terlepas dari tingginya permintaan dan cepatnya uang yang berputar.

Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan angka pengangguran tinggal 5%-6% dan kemiskinan menjadi 8%-10%. Oleh karena itu, pemerintah bertekad meneruskan program KUR. Namun, selama ini KUR yang diberikan belum mampu memberi keringanan bagi pelaku usaha.

Dari sisi perbankan, ada dua aspek yang diperhitungkan, yaitu penawaran dan permintaan. Perbankan masih melihat UMKM berisiko tinggi. Di sisi lain, bank harus memperhitungkan ketersediaan dana yang bisa disalurkan dan peluang dana tersebut akan kembali. Bank perlu menganalisis apakah permintaan kredit itu memiliki penjaminan kredit.

Untuk memudahkan UMKM memperoleh jaminan dari bank, pemerintah perlu mengupayakan adanya kemitraan. Penjaminan kredit bisa dipercepat dengan adanya kemitraan UMKM dengan usaha besar atau BUMN.

### **Kurang Gairah**

Program KUR sangat efektif membantu perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru. Sebagian besar nasabah KUR terbukti bisa bermutasi menjadi nasabah komersial atau menjadi bankable. Sayangnya, pemerintah dan perbankan kurang bergairah mendorong pertumbuhan KUR. Padahal, pemerintah bisa saja membuat program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) yang bisa dijadikan jaminan bagi pelaku UMKM. Proses untuk memperoleh KUR masih terlalu banyak prosedur.

Selain proses yang mudah, pemerintah seharusnya bisa memperbesar jumlah KUR. Jika memungkinkan, suku bunga KUR diturunkan. Selain itu juga perlu UU UMKM untuk payung hukum yang menjamin adanya kepastian bagi pelaku usaha.

Yang perlu diperhatikan adalah soal dukungan teknologi. Selama ini pemerintah menganggap program UMKM berhasil kalau UMKM makin banyak. Seharusnya dibuat juga inovasi dan slight entrepreneurship.

Selain menetapkan target baru, pemerintah pusat juga harus mampu membenahi kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pengucuran dana KUR. Pemerintah pusat perlu melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah serta bank-bank pelaksana agar mereka mau lebih giat lagi dalam meningkatkan pengucuran dana skim kredit tersebut.

Pemerintah perlu mengkaji lagi berbagai kebijakan yang telah diluncurkan terkait dengan pengucuran dana lewat skim KUR. Jika dimungkinkan, pemerintah perlu mengompromikan kembali dengan pihak bank pelaksana mengenai penetapan suku bunga KUR. Selain itu, kegiatan sosialisasi mengenai program KUR juga perlu ditingkatkan agar realisasi pengucuran KUR sesuai target dan efek kesejahteraan yang diharapkan pun dapat terwujud. \*\*\*

*Penulis adalah Direktur Hadharah Institute,  
alumnus University of Sydney, Australia*

---